

**PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (LAN)

UNIT KERJA : PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN HUKUM  
ADMINISTRASI NEGARA**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : EDY SAPUTRA
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 413578

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 500.000.000

1. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/36 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 205.000.000

1. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. LAINNYA, SEPEDA ONTEL Tahun 1980, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
3. MOBIL, MITSUBHISI XPANDER Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 190.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 120.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 1.015.000.000**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.015.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id).



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.